

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adhitama P., Negarawan. 2015. *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Wujud Praksis Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi Pada PTUN Semarang)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Arpan Marwasih, N. S. 2018. *Konsekuensi Yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kompetensi Absolut PTUN*. Yogyakarta: Master's thesis Universitas Islam Indonesia.
- Asa, M. Fanshurullah. 2021. *Energi Untuk Kemandirian*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Azhar, M.. 2015. *Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara*. Semarang: Notarius.
- Daim, Nuryanto A.. 2014. *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan TataUsahaNegara*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Djatmiati, Tatiek Sri. 2007. *Pidato Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik*. Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Hukum Administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (Sabtu, 24 November 2017).

- Hadi, Syofyan & Tomy Michael. 2017. *Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Jurnal Cita Hukum.
- Hadiyono, V. 2020. *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*. Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan.
- Hadjon, Philipus M. et al.. 2011. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M.. 2017. *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Haznan, Fauzyl. *Syarat Sah Keputusan Tata Usaha Negara*. Padang: Universitas Ekasakti-AAI.
- Herman, Hendry Julian N., 2017. *Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)*. Jurnal Komunikasi Hukum.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jaelani, Abdul Kadir. 2020. *Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Surakarta: Pena JustisiaMedia Komunikasi dan Kajian Hukum.
- Khairo, Fatria. 2017. *Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Jurnal Lex Librum.

- Khaleed, Badriyah. 2016. *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Lispaduka, Y. B.. 2014. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) Dalam Menjamin Ketersediaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Samarinda*. Surabaya: Doctoral dissertation, Universitas Airlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasarudin, Tubagus Muhammad. 2016. *Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan*. Jurnal Hukum Novelty.
- Nasution, B. J. 2006. *Tinjauan tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Demokrasi.
- Pratama, Y., Tirtasah, M. I., Ahmady, Y. N., & Wardhana, A. 2019. *Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Keputusan yang Dimohonkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara*. Surabaya: Perspektif Hukum.
- Putra, Hidayat Pratama. 2020. *Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan*. Jayapura: Jurnal Hukum Peratun.
- Putra, I Gede Eka. 2017. *AAUPB Sebagai Dasar Pengujian dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*. Palembang: Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

- Putra, M. Amin. 2020. *Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jayapura: Jurnal Hukum Peratun.
- Remaja, I Nyoman Gede. 2017. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Rohana, S., Sulissusiawan, A., & Susilawati, E. 2018. *Penulisan Surat Edaran Dan Surat Pengumuman Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya*. Pontianak: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK).
- Soetami, A. Siti. 2011. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- S., Sarianti. 2016. *Bab II Deskriptif Teoritik*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya.
- Sugiono. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Research & Development*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, S. N. H. 2021. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*. Semarang: Administrative Law and Governance Journal.
- Teguh, Harry Pratama & Ojarudin Ritonga. 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; Pedoman Dan Praktik Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tjandra, Riawan. 2015. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Internet atau Website

Anonim. 2017. Diakses melalui

<http://repository.uinbanten.ac.id/2623/7/BAB%20III.pdf>

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, (2017), diakses melalui

<https://www.bphmigas.go.id/peresmian-calon-ketua-dan-anggota-komite-bph-migas-periode-2016-2020/>

Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI. 2019. *Buku 4:*

Pedoman Teknis Penganganan Sengketa Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan RI

Wahyunadi, Yodi Martono. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam*

Sistem Peradilan Di Indonesia, Diakses melalui https://ptun-jakarta.go.id/wpcontent/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
 Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman
 Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh
 Upaya Administratif

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
 11.K/KP.03/MEM.5/2021 Tentang Pedoman Seleksi Calon Komite Badan
 Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
 Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
 50.K/KP.05/MEM/2021 Tentang Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Ketua
 dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian
 Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi
 Melalui Pipa

Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 15.Pm/KP.03/SJN.P/2021 tentang Hasil
 Seleksi Pengisian Jabatan Calon Ketua Dan Anggota Komite Badan
 Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan
 Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 172/G/2021/PTUN.JKT.